

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi masa Persatuan Ummat Islam merupakan gabungan dari dua organisasi masa Islam yang tumbuh dan didirikan oleh asli orang Jawa Barat.¹ Kedua organisasi itu adalah Perikatan Ummat Islam berpusat di Majalengka dengan tokoh pendirinya K.H. Abdul Halim dan Persatuan Ummat Islam Indonesia berpusat di Sukabumi dengan tokoh pendiri K.H. Ahmad Sanusi. Sebelum bergabung menjadi PUI, organisasi yang didirikan K.H. Abdul Halim dan K.H. Ahmad Sanusi pernah mengalami pasang surut dan perubahan nama.²

Perikatan Ummat Islam merupakan yang pada awal didirikannya pada 1911 bernama *Madjlisoel 'Ilmi*.³ Satu tahun

¹ Jawa Barat bukan hanya tempat kelahiran organisasi massa Islam Perikatan Ummat Islam dan Persatuan Ummat Islam Indonesia, tetapi juga tempat lahirnya organisasi massa Islam Persatuan pada 1 September 1923 di Bandung. Pendiri Persatuan Islam adalah Haji Zamzam dan Haji Mahmud Junus (dari sumetra) ahmad Hassan sendiri (kelahiran Singapura) baru bergabung organisasi ini pada tahun 1924. Namun demikian, pada Ahmad Hassan inilah Persatuan Islam menyatakan secara terang-terangan sebagai barisan Muslim modernis. Dalam beberapa kegiatannya, gerakan modernis disuarakan Persatuan Islam lebih mengarah kepada pemurnian Islam dari pengaruh khurafat dan bid'ah. Wawan Hernawan, *Seabad Persatuan Ummat Islam (1911-2011)*, (Jawa Barat: Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat, 2014), p. 30.

² Wawan Hernawan, *Seabad Persatuan Ummat Islam (1911-2011)*..., p. 1.

³ Madjlisoel 'Ilmi atau majelis ilmu adalah tempat pendidikan agama yang didirikan Abdul Halim pada sebuah langgar sederhana milik bapak Sawat, berukuran 2 x 4 meter terbuat dari bambu dan atap ilalang. Bangunan itu terletak di teppi sungai Citangkurak (sekarang bangunan Bapermin, Majalengka). Di antara para murid Abdul Halim ketika itu adalah Moh. Sjafari, Ahmad Sjato', Ahmad Zuhri, Abdoel Fatah, Jamaludin, M. Kosim, dan M. Adnan. Wawan Hernawan, *Seabad Persatuan Ummat Islam (1911-2011)*..., p. 30.

kemudian, pada tahun 1912 *Madjlisoel 'Ilmi* berganti nama *Hajatoel Qoeloeb*. Dalam kegiatannya *Hajatoel Qoeloeb* merekrut anggota dari kalangan pedagang dan petani (pribumi).⁴ Pada 1915 organisasi ini dilarang pemerintah Kolonial tanpa alasan yang jelas.⁵

Menghadapi kenyataan demikian, K.H. Abdul Halim tidak patah semangat. Kegiatan *Hajatoel Qoeloeb* tetap dilanjutkannya sekalipun tanpa nama resmi. Gerakan ekonomi terus dikembangkan, sementara dalam bidang pendidikan mulai dibentuk organisasi baru bernama *Jam'ijjat I'anat al-Muta'allimin* pada 16 Mei 1916. Dalam waktu singkat *Jam'ijjat I'anat al-Muta'allimin* terkenal sebagai satu-satunya pusat pendidikan modern di Majalengka.⁶

Selain itu, K.H. Abdul Halim juga memandang perlu segera mengajukan permohonan badan hukum *Jam'ijjat I'anat al-Muta'allimin* kepada pemerintah Hindia Belanda. Atas arahan dan bantuan Tjokrominoto, pada 21 Desember 1917 *Jam'ijjat I'anat al-Muta'allimin* memperoleh *rechtspersoonlijkheid* (terdaftar dan berbadan hukum resmi) dari pemerintah Hindia Belanda dengan Persjarikatan Oelama (PO). PO bergerak dalam bidang pendidikan,

⁴ *Hajatoel Qoeloeb* dalam bidang ekonomi semacam koperasi simpan-pinjam. Setiap anggota dikenakan iuran wajib ketika masuk menjadi anggota sebanyak 10 sen dan iuran mingguan sebanyak 5 sen. Dari sejumlah dana yang masuk, selain digunakan biaya pendirian perusahaan tenun, juga membantu para anggota untuk menambah modal usaha dalam persaingan mereka dengan pedagang-pedagang China. Sedang dalam bidang pendidikan, diadakan pelajaran agama seminggu sekali yang dikhususkan bagi orang-orang dewasa dengan materi *fiqh* dan *hadits*. Wawan Hernawan, *Seabad Persatuan Ummat Islam (1911-2011)...*, p. 31.

⁵ Wawan Hernawan, *Seabad Persatuan Ummat Islam (1911-2011)...*, p.1.

⁶ Wawan Hernawan, *Seabad Persatuan Ummat Islam (1911-2011)...*, p.2.

sosial, dan ekonomi.⁷ Persjarikatan Oelama mulai menyusun pembedangan ilmu agama Islam meliputi: Ilmu *Sjar'ijjah*, Ilmu *Aqlijjah*, Ilmu *Adabijjah*, dan Ilmu *Rijadlijjah*.⁸

Persjarikatan Oelama merupakan organisasi sosial dan keagamaan yang berupaya mengembangkan sistem pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam dan melakukan dakwah dalam rangka menyiarkan agama Islam. Eksistensi organisasi tersebut mendapat dukungan penuh dari H.O.S. Tjokroaminoto dengan mengupayakan pengakuan secara hukum atas keberadaan organisasi tersebut. Gubernur Jendral J.P. Graaf van Limburg Stirum memberikan status badan hukum kepada PO pada akhir tahun 1917 berdasarkan *Rechtspersoon* (Pengesahan Pemerintah) No. 43 tanggal 21 Desember 1917 dengan wilayah operasional di Kabupaten Majalengka.⁹ Sejak 1924, PO melebarkan sayapnya di seluruh Jawa dan Madura, dan pada 1937 ke seluruh Indonesia. Pada tahun-tahun tersebut, PO berhasil mendirikan cabang-cabang di Semarang, Purwokerto (Banyumas), dan Tebing Tinggi (Sumatra Selatan). Pada awal pendudukan Jepang, nama PO diganti menjadi Perikatan Oemmat Islam (POI) yang dengan perubahan ejaan Bahasa Indonesia pada 1947 menjadi Perikatan Ummat Islam (PUI).¹⁰

Seperti halnya Perikatan Ummat Islam, organisasi Persatuan Ummat Islam Indonesia juga mengalami proses pergantian nama.

⁷ Wawan hernawan, *Seabad Persatuan Ummat Islam (1911-2011)...*, p.2.

⁸ Wawan hernawan, *Seabad Persatuan Ummat Islam (1911-2011)...*, p.105.

⁹ Nina Herlina Lubis, *Sejarah Perkembangan Islam di Jawa Barat*, (Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat, 2011), p. 280-281.

¹⁰ Wawan hernawan, *Seabad Persatuan Ummat Islam (1911-2011)...*, p. 2-3.

Pada awal didirikannya, November 1931 bernama *Al-Ittihadijatoel Islamijjah* (All). *Al-Ittihadijatoel Islamijjah* pertama kali berkantor pusat Tanah Tinggi No. 191, Kramat, Batavia Centrum. Organisasi *Al-Ittihadijatoel Islamijjah* bergerak dalam bidang sosial dan pendidikan, sekaligus menjadi wadah pergerakan nasional untuk menanamkan harga diri, persamaan, persaudaraan dan kemerdekaan. Namun, meskipun *Al-Ittihadijatoel Islamijjah* bukan organisasi politik, pendidikan yang diajarkan K.H. Ahmad Sanoesi mengakibatkan organisasi itu menjadi yang paling militan di Priangan Barat dan Buitenzorg (Bogor sekarang).¹¹

Prosesi fusi antara Perikatan Ummat Islam dengan Persatuan Ummat Islam Indonesia menjadi Persatuan Ummat Islam cukup mengejutkan semua pihak, termasuk anggota Persatuan Ummat Islam itu sendiri. Akim menyebutkan, menjadi Persatuan Ummat Islam itu mendapat sambutan yang mengherankan sekali! Heran, tapi gembira! Karena di lain pihak umat Islam sedang mengalami perpecahan, pada tubuh ini malah menjadi satu.¹²

Bersatunya kedua organisasi ini disebabkan oleh tiga faktor. Faktor pertama, adanya persamaan yang terdapat dalam dua organisasi itu, khususnya dalam dasar dan prioritas program perjuangan yang sama-sama berdasarkan Islam dan mengutamakan program perjuangan di bidang pendidikan. Kedua, masing-masing organisasi menyadari bahwa kader potensial yang dimiliki mereka sangatlah minim, sedangkan perjuangan mereka masih sangat

¹¹ Wawan Hernawan, *Seabad Persatuan Ummat Islam (1911-2011)...*, p.3.

¹² Wawan Hernawan, *Seabad Persatuan Ummat Islam (1911-2011)...*, p.186.

panjang. Selain itu, permasalahan yang akan mereka hadapi pun akan semakin kompleks. Penyatuan kedua organisasi itu akan mempersatukan kader potensial sehingga tantangan organisasi ini di masa depan akan dapat dihadapi jauh lebih ringan. Ketiga, kedua organisasi ini memiliki kekhawatiran yang sama terhadap kondisi umat Islam yang pada waktu sedang terancam disintegrasi.¹³

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas penulis melakukan penelitian tentang:

“Peranan K.H. Abdul Halim Dalam Mengembangkan Persatuan Ummat Islam Tahun 1952-1962”

C. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Riwayat Hidup K.H. Abdul Halim?
2. Bagaimana Persatuan Ummat Islam Tahun 1952-1962?
3. Bagaimana Peranan K.H. Abdul Halim Dalam Mengembangkan PUI Tahun 1952-1962?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis untuk membahas masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Riwayat Hidup K.H. Abdul Halim
2. Untuk mengetahui Persatuan Ummat Islam Tahun 1952-1962

¹³ Miftahul Falah, *Riwayat Perjuangan K.H. Abdul Halim*, (Jawa Barat: Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat, 2008), p.158-159.

3. Untuk mengetahui Peranan K.H. Abdul Halim Dalam Mengembangkan PUI Tahun 1952-1962

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata peranan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa atau kejadian yang mempunyai pengaruh besar dalam menggerakkan suatu perubahan yang lebih baik.¹⁴ Sedangkan tokoh adalah pemegang peran (peran utama) keteladanan pimpinan yang baik yang dapat dijadikan contoh dan dapat diteladani sifat-sifat baiknya.¹⁵

Menurut Zamakhsyari menyatakan bahwa kekuatan kyai terletak pada dua hal, yaitu *pertama*: memiliki perasaan kemasyarakatan yang dalam dan tinggi (high developed social senses); dan *kedua*: selalu melandaskan sesuatu kepada kesepakatan bersama (general consensus). Dengan demikian, peranan kyai tidak sebatas hanya dalam bidang keagamaan, tetapi dalam bidang-bidang sosial lainnya.¹⁶

Menurut Nimmo yang dikutip oleh Asep Saiful Muhtadi juga mengatakan bahwa kyai merupakan komunikator profesional dengan keahliannya mengendalikan keterampilan yang khas. Memanfaatkan

¹⁴ Poerdawarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), p. 845.

¹⁵ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), cet. 2, p. 1065.

¹⁶ Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Nahdhatul Ulama; Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*, (Jakarta: LP3ES, 2004), p. 39.

keahlian atau keterampilan ini untuk menyatukan dan menghubungkan orang-orang yang berbeda atau kelompok-kelompok yang dibedakan.¹⁷

Peranan kyai bagi kebanyakan masyarakat Islam tradisional di Jawa, dianggap sebagai figur sentral yang diibaratkan kerajaan kecil yang mempunyai wewenang dan otoritas mutlak di lingkungan pesantren. Tidak seorangpun santri atau orang lain yang berani melawan kekuasaan kyai (dalam lingkungan pesantrennya), kecuali kyai lain yang lebih besar pengaruhnya. Sejak Islam mulai tersebar di pelosok Jawa, terutama sejak abad 13 dan 14, para kyai sudah memperoleh status sosial yang tinggi. Di bawah pemerintahan kolonial Belanda, kyai semakin memperlihatkan daya tawar tinggi. Mereka merupakan bagian dari kelompok *elite* masyarakat yang disegani sekaligus berpengaruh baik, secara politik, ekonomi, maupun sosial budaya.¹⁸

Peran penting kyai terus signifikan hingga kini. Kyai dianggap memiliki pengaruh secara sosial dan politik, karena memiliki ribuan santri yang taat dan patuh serta mempunyai ikatan primordial dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Dengan kelebihan inilah, banyak kyai dan pesantren sering dilibatkan dalam momen-momen politik, baik dalam setiap pemilu maupun dalam kehidupan berbangsa bernegara.

¹⁷ Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Nahdhatul Ulama; Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif...*, p.43.

¹⁸ Amin Haedari, *Masa depan pesantren dalam tantangan modernitas dan tantangan kompleksitas global*. Cet ke-1 (Jakarta: IRD Press November 2004), p. 30.

Maka, sejak tahun berdirinya negeri ini, banyak dikenal kyai yang duduk sebagai pejabat eksekutif, maupun anggota legislatif.¹⁹

Partai politik merupakan gagasan bahwa rakyat merupakan Faktor yang perlu di perhitungkan dalam proses politik, maka dari itu lahirnya partai politik merupakan penghubung antara rakyat dan pemerintah. Hal ini ditempuh sebagai sarana untuk mewujudkan hak rakyat dan untuk menentukan figur-figur yang akan memimpin kelak.²⁰

Pengertian politik menurut Miriam Budiardjo adalah suatu kelompok yang terorganisasi dimana para anggotanya mempunyai orientasi, cita-cita dan nilai-nilai yang sama. Tujuan kelompok ini yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakannya.²¹

Secara khusus pengertian partai politik disebutkan dalam UU RI No. 31 Tahun 2002 mengenai partai politik, yaitu pengertian partai politik merupakan organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita, untuk dapat memperjuangkan kepentingan anggota, kepentingan masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.²²

Keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang berisi anjuran untuk mendirikan partai politik, mendapat respon

¹⁹ Amin Haedari, *Masa depan pesantren dalam tantangan mordenitas dan tantangan kompleksitas global...*, p. 30.

²⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet ke-4 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 1993), p. 159-160.

²¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik...*, p. 387.

²² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik...*, p.388.

dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangan umat Islam. Para Tokoh Islam kemudian mengadakan Muktamar Umat Islam di Yogyakarta pada tanggal 7 dan 8 November 1945. Muktamar memutuskan mendirikan Partai Masyumi. Partai Masyumi merupakan salah satu partai politik dari rahim proklamasi kemerdekaan Indonesia.²³

Sejak diadakannya Muktamar Umat Islam di Yogyakarta, Masyumi sudah didukung organisasi-organisasi Islam yang sudah didirikan pada masa penjajahan Belanda, seperti NU dan Muhammadiyah. Perkembangan anggota Masyumi semakin pesat setelah bergabungnya organisasi Islam yang bersifat lokal. Pada mulanya yang bergabung adalah Persatuan Ummat Islam dan Perikatan Ummat Islam.²⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian sejarah yang meliputi empat tahapan penelitian, yaitu tahapan heuristik, tahapan kritik, tahapan interpretasi dan tahapan historiografi:

1. Tahapan Heuristik

Heuristik berasal dari bahasa Yunani eureka yang artinya menemukan. Pada tahap ini, kegiatan diarahkan pada penjajakan, pencarian, dan pengumpulan sumber-sumber yang berhubungan dengan topik penelitian, temuan benda maupun sumber lisan. Selain itu,

²³ Insan Fahmi Siregar, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Partai Masyumi 1945-1960*, Jurnal *Thaqafiyat*, Vol 14, No. 1, 2013, p. 89.

²⁴ Insan Fahmi Siregar, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Partai Masyumi 1945-1960...*, p. 93-94.

Kuntowijoyo membuat spesifikasi teknik pengumpulan data, yaitu data yang diperoleh dari dokumen tertulis, artefak, sumber lisan dan sumber kuantitatif.²⁵ Pada tahapan heuristik penulis mengumpulkan sumber yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas baik sumber primer dan sekunder.²⁶

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sumber sekunder dan sumber primer. Dalam mencari sumber, penulis menggunakan beberapa buku yang penulis peroleh dari koleksi pribadi, toko-toko buku baik toko buku langsung maupun toko buku online, sumber jurnal dan juga pencarian diberbagai perpustakaan. Perpustakaan yang penulis kunjungi diantaranya yaitu Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan kampus UIN SMH Banten, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, dan Perpustakaan Pondok Santi Asromo. Buku-buku yang penulis dapatkan diantaranya adalah Arsip Pendaftaran Orang Indonesia yang Terkemuka yang ada di Jawa, Sejarah Perkembangan Islam di Jawa barat karangan Nina Herlina Lubis dkk, Ensiklopedia Tokoh Pendidikan Islam karangan Ramayulis dan Samsul Nizar, Ensiklopedia 1 karangan Hafizh Anshari dkk, Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Mordenitas dan Tantangan Komplexitas Global karangan Amin Haedari, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Partai Masyumi 1945-1960 karangan Insan Fahmi Siregar, Ensiklopedia Nasional Indonesia karangan Tim penyusun (ENI), Mengenang Perjuangan dan Kepahlawanan K.H. Abdul Halim

²⁵ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995), p.95.

²⁶ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah...*, p. 95.

karangan Momon Lentuk, Metode Penelitian Dakwah karangan Wardi Bactiar, Gerakan Moderen Islam di Indonesia karangan Deliar Noer, Politik dan Pemikiran K.H. Abdul Halim karangan Wawan Hernawan dan Erba Rosalina Yulianti, Tentang Intisab dan Ahlusunnah Waljamaah karangan Yazid Bustomi, Pengantar Ilmu Sejarah karangan Kuntowijoyo, Komunikasi Polotik Nahdlatul Ulama karangan Asep saeful Muhtadi, Tujuan dan Pola Dasar Pendidikan PUI karangan Wanta, Seabab Persatuan Ummat Islam (1911-2011) karangan Wawan Hernawan, Riwayat Perjuangan K.H. Abdul Halim karangan Miftahul Falah, K.H. Abdul Halim dan Penggeraknya karangan Suracman, Dasar-dasar Ilmu Politik karangan Miriam Budiarjo.

Adapun yang dimaksud dengan interview atau wawancara adalah teknis dalam upaya menghimpun data yang akurat untuk keperluan melaksanakan proses pemecahan masalah tertentu sesuai dengan data. Data yang diperoleh dengan teknis ini adalah dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seseorang atau beberapa orang yang diwawancarai.²⁷ Dalam pemahaman terhadap objek penelitian tentang Peranan K.H. Abdul Halim Dalam Mengembangkan PUI Tahun 1952-1962, maka peneliti melakukan wawancara kepada K.H. Kholiq Fadlullah sebagai cucu K.H. Abdul Halim dan Asep Zaki sebagai Pimpinan Pondok Pesantren Santi Asromo.

2. Tahapan Kritik

²⁷ Wardi Bactiar, Metode Penelitian Dakwah, (jakarta: Logos, 1997), p. 72.

Setelah sumber sejarah dalam berbagai kategorinya itu terkumpul, tahap berikutnya adalah verifikasi atau kritik untuk memperoleh keabsahan sumber. Dalam hal ini dilakukan uji keabsahan tentang keaslian sumber (otentitas) yang dilakukan melalui kritik ekstern dan keabsahan tentang keahlian sumber (kredibilitas) yang ditelusuri melalui kritik intern.²⁸

- Kritik Ekstern dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keabsahan dan otentitas sumber tersebut. Peneliti dapat mengecek dan bertanya otentitas sumber tersebut, misalnya: memastikan apakah dokumen tersebut asli atau turunan; semacam fotocopy atau salinan, mengecek tanggal penerbitan dokumen, semacam kertas dan tinta, mengecek bahan dokumen, apakah tampilannya selaras atautkah tidak dengan waktu terjadi peristiwa, dan memastikan apakah sumber tersebut masih keadaan utuh atau sudah berubah.
- Kritik Intern diperlukan untuk menilai tingkat kelayakan atau kredibilitas sumber. Kredibilitas sumber biasanya mengacu pada kemampuan sumber untuk mengungkapkan kebenaran suatu peristiwa sejarah. Untuk mempertanyakan keotentikan data-data yang terdapat pada sumber berdasarkan cir-ciri fisik dari suatu sumber ejaan, pola, tulisan bentuk abjad dan tinta yang digunakan.²⁹

3. Tahapan Interpretasi

Tahapan Interpretasi adalah menafsirkan fakta sejarah dan merangkai fakta tersebut menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Interpretasi atau penafsiran sering disebut sebagai biang

²⁸ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah...*, p. 77.

²⁹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah...*, p. 77-78.

subjektivitas. Itu sebagian benar dan juga salah. Benar karena tanpa penafsiran sejarawan, data tidak bisa berbicara. Sejarawan yang jujur akan mencantumkan data dan keterangan dari mana data itu diperoleh. Orang lain dapat melihat kembali dan menafsirkan ulang. Itulah sebabnya, subjektivitas penulisan sejarah diakui, tetapi untuk dihindari. Interpretasi itu dua macam, analisis (menguraikan) dan sintesis (menyatukan).³⁰

4. Tahapan Historiografi (Penulisan)

Dalam penulisan sejarah, aspek kronologinya sangat penting.³¹ Kronologis peristiwa harus sejalan dengan berjalannya waktu. Pembahasan yang ditulis akan di sejalankan dengan tahun yang berlangsung. Dengan jalannya waktu yang sesuai maka pembahasannya pun akan terlihat hidup.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian terdiri dari lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan penjelasan dari bab tersebut. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

³⁰ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah...*, p. 78-79.

³¹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah...*, p. 80.

Bab II: Riwayat Hidup K.H. Abdul Halim, meliputi: Latar Belakang Kehidupan K.H. Abdul Halim, Pendidikan K.H. Abdul Halim, dan karya K.H. Abdul Halim.

Bab III: Persatuan Ummat Islam Tahun 1952-1962, meliputi: Perkembangan Persatuan Ummat Islam, Perkembangan Persatuan Ummat Islam Tahun 1952-1962, Peran Persatuan Ummat Islam dalam Sosial Kemasyarakatan di Jawa Barat Tahun 1952-1962.

Bab IV: Peranan K.H. Abdul Halim Dalam Mengembangkan Persatuan Ummat Islam Tahun 1952-1962, meliputi: Peran K.H. Abdul Halim Dalam Bidang Politik, Peran K.H. Abdul halim Dalam Bidang Ekonomi dan Peran K.H. Abdul Halim Dalam Bidang Pendidikan Keagamaan.

Bab V: penutup, meliputi: Kesimpulan dan Saran.